



PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO

RENJA

Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan
Transmigrasi Provinsi Gorontalo
Tahun 2026





LEMBAR PENGESAHAN

Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo sebagai dasar dan arah dalam pelaksanaan pembangunan tahun 2026 guna mendukung pencapaian target Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam RPJMD Tahun 2025-2029 dan RENSTRA Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Gorontalo, Juli 2025
KEPALA DINAS

Drs. WARDOYO M. PONGOLIU, M.Si

Pembina Utama Madya
NIP. 19690524 198902 1 002





KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah dipanjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas izin dan perkenanNya, kami dapat menyusun Rencana Kerja (RENJA) Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo Tahun 2026 sebagai salah dokumen perencanaan yang wajib disusun oleh setiap Organisasi Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo Tahun 2026 merupakan penjabaran tahun pertama Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo (RENSTRA) Tahun 2025-2029, sebagai konsekwensi logis pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Gorontalo tahun 2025-2029 di sektor Ketenagakerjaan, Sektor Energi Sumberdaya Mineral serta sektor Ketranmigrasian.

Dokumen Renja ini menjadi pedoman pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2026, disusun dengan melibatkan seluruh pejabat fungsional maupun struktural dari setiap bidang, sekretariat dan UPTD Balai Latihan Kerja. Kami menyadari dokumen ini masih jauh dari sempurna, karenanya dengan senang hati kami mengharapkan masukan seluruh pihak yang berkepentingan menuju kearah perbaikan untuk melaksanakan tugas-tugas kedepan, terimaKasih.

Gorontalo, Juni 2025
KEPALA DINAS

Drs. WARDOYO M. PONGOLIU, M.Si

Pembina Utama Madya
NIP. 19690524 198902 1 002





DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii

BAB I : PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang	I – 1
1.2. Landasan Hukum	I – 4
1.3. Maksud dan Tujuan	I – 5
1.4. Sistematika Penulisan	I – 6

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	II – 1
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	II – 9
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	II – 25
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	II – 25
2.5. Telaah Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	II – 27

BAB III : TUJUAN dan SASARAN

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional	III – 1
3.2. Tujuan dan Sasaran	III – 2
3.3. Program Kegiatan	III – 2

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH IV – 1

BAB V : PENUTUP

5.1. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian	V – 1
5.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan	V – 2





5.3. Rencana Tindak Lanjut..... V – 2

LAMPIRAN





BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2024 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Mengamanatkan Perangkat Daerah untuk Menyusun Renja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama 1 (satu) tahun yang merupakan terjemahan dari perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Dokumen Renja Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo Tahun 2026 mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahun 2026 pemerintah daerah, mengingat beberapa hal sebagai berikut:

1. Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan strategis dalam menjembatani perencanaan Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.
2. Renja merupakan acuan Perangkat Daerah untuk memasukan program kegiatan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran - Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) dan perencanaan program kegiatan yang dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2026.
3. Renja Perangkat Daerah merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan instansi untuk mengetahui capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Perangkat Daerah pada tahun 2024.
4. Penyusunan Renja Perangkat Daerah berpedoman hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan, dengan tujuan memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam rancangan akhir





Renja Perangkat Daerah dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah.

5. Penyempurnaan Renja Perangkat Daerah mencakup perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran pada RKPD.

Mengingat pentingnya dokumen Renja Perangkat Daerah dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja Perangkat Daerah harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, serta disusun dengan berpedoman pada:

1. Berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2024 dan mengacu pada RKPD tahun 2026 serta RPJMD tahun 2025 – 2029.
2. Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam RKPD tahun 2026 serta RPJMD tahun 2025 – 2029.
3. Program dan kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum musrenbang dan Forum OPD.
4. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.
5. Program dan kegiatan Tahun 2026 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah yang





telah dilakukan pemutakhiran ketiga dengan Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023

Dokumen Renja Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo Tahun 2026 juga memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam RKPD pada tahun 2026;
2. Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD
3. Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah
4. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
5. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah memuat kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.
6. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
7. Review terhadap Rancangan Awal RKPD, Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
8. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan
9. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.
10. Program dan kegiatan Tahun 2026 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan





Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah, serta Kepmendagri 900.1.15.5-1317 tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Kualitas dokumen Renja sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, Renja yang telah tercantum dalam KUA-PPAS digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah, olehnya penyusunan Renja Perangkat Daerah sangat ditentukan oleh kemampuan Perangkat Daerah dalam menganalisa, menyusun, mengimplementasikan, mengendalikan, mengorganisasikan dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi dinas.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja 2026 Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo berpedoman pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo.
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang, Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka





Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Menengah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
10. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
12. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2021, tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Tahun 2022.
13. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 38 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Daerah

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud :

Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi provinsi Gorontalo Tahun 2026 yang merupakan penjabaran RKPD Provinsi Gorontalo Tahun 2026 dimaksudkan sebagai wahana yang menampung seluruh aspirasi program dan kegiatan Pembangunan di bidang ketenagakerjaan, energi sumber daya mineral dan ketransmigrasian di Provinsi Gorontalo pada tahun anggaran berkenaan dan sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Renstra Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo.





Tujuan :

Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo Tahun 2026 ditujukan untuk memfasilitasi, menjalankan misi pemerintahan dan Pembangunan serta mewujudkan tujuan ketenagakerjaan, ESDM dan ketransmigrasian secara bertahap. Selain itu tujuan disusunnya Rencana Kerja sebagai pedoman :

- 1) Pelaksanaan pelayanan OPD;
- 2) Pelaksanaan dan evaluasi program dan kegiatan;
- 3) Penyusunan rencana anggaran dan perangkat daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Dokumen Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo tahun 2026 ini dituangkan dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan:

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu:

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah.
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bab III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan

Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab V Penutup

Lampiran-lampiran





BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu Dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo adalah salah satu OPD yang membantu tugas Gubernur dalam pelaksanaan tugas untuk Urusan Tenaga Kerja, Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral dan Urusan Transmigrasi di Provinsi Gorontalo. Dinas ini dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan daerah Provinsi Gorontalo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Daerah.

Dalam melaksanakan tugas-tugas teknis di bidang ketenagakerjaan dinas ini dilengkapi dengan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Balai Latihan Kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Ketenagakerjaan.

Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi merupakan OPD yang menyelenggarakan 3 (tiga) urusan pemerintahan. Tugas Dinas tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tenaga kerja, energi sumber daya mineral dan transmigrasi. Dalam pelaksanaan tugas tersebut, Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo masih kurang optimal karena ketersediaan sarana prasarana yang kurang memadai terutama untuk mendukung tugas, Sumberdaya Manusia dan sumber dana yang terbatas.

Pada Tahun 2024, Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo mendapatkan alokasi APBD sebesar **Rp. 17.063.645.743**, setelah perubahan menjadi **Rp. 16.633.188.181**. Pada bulan Desember 2024 tercatat realisasi fisik mencapai 100% dan realisasi keuangan mencapai **Rp. 16.633.188.181,-** atau 98,06% dengan rincian sebagai berikut :





Tabel 2.1

Alokasi Anggaran per Urusan Tahun 2024

No.	Urusan	Pagu Anggaran	Realisasi
1.	Urusan Ketenagakerjaan	15.775.940.243	15.463.176.082
2.	Urusan ESDM	811.445.500	804.820.449
3.	Urusan Ketransmigraasian	3774.260.000	365.191.650

Anggaran tersebut diatas dialokasikan pada 11 (sebelas) Program dan 17 (tujuh belas) kegiatan dan 22 (dua puluh dua) subkegiatan, terdiri atas:

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, dengan kegiatan dan subkegiatan :
 1. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Subkegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Dinas dan BLK)
 2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Subkegiatan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 3. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah
 - Subkegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 4. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Subkegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Subkegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 2) Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja, dengan kegiatan dan subkegiatan :
 1. Kegiatan Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan klaster kompetensi
 - Subkegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi (Dinas dan BLK)
- 3) Program Penempatan Tenaga Kerja, dengan kegiatan dan subkegiatan :
 1. Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja





- Subkegiatan Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online
- 4) Program Hubungan Industrial, dengan kegiatan dan subkegiatan :
1. Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di 1 (satu) Daerah provinsi
 - Subkegiatan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di 1 (satu) Daerah provinsi.
 2. Kegiatan Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Upah Minimum Kab/Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kab/Kota (UMSK)
 - Subkegiatan Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)
 - Subkegiatan Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja
- 5) Program Pengawasan Ketenagakerjaan, dengan kegiatan dan subkegiatan :
1. Kegiatan Penyelenggaraan pengawasan Ketenagakerjaan
 - Subkegiatan Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan
- 6) Program Pengelolaan Aspek Gegeologian, dengan kegiatan dan subkegiatan :
1. Kegiatan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi
 - Subkegiatan Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah
- 7) Program Pengelolaan Mineral dan Batubara, dengan kegiatan dan subkegiatan:
1. Kegiatan Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) daerah Provinsi dan wilayah laut sampai dengan 12 mil
 - Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan WIUP bukan Logam dan Batuan dalam wilayah 1 (satu) daerah Provinsi dan wilayah laut sampai dengan 12 mil.
- 8) Program Pengelolaan Energi Terbarukan, dengan kegiatan dan subkegiatan :
1. Kegiatan Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi





- Subkegiatan Pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah
- 2. Kegiatan Pengelolaan Konservasi Energi terhadap kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi
 - Subkegiatan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan konservasi energi pada kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi
- 9) Program Pengelolaan Ketenagalistrikan, dengan kegiatan dan subkegiatan :
 1. Kegiatan Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam daerah Provinsi
 - Subkegiatan Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi
 2. Kegiatan Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan
 - Subkegiatan Penetapan Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu
- 10) Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi, dengan kegiatan dan subkegiatan :
 1. Kegiatan Penataan Pesebaran Penduduk yang berasal dari lintas Daerah Kab/Kota dalam satu Daerah Provinsi, sebagai berikut:
 - Subkegiatan Bantuan Non Standar Transmigrasi (Dalam Bentuk Barang sesuai Kearifan Lokal)
- 11) Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi, dengan kegiatan dan subkegiatan :
 1. Kegiatan Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan
 - Subkegiatan Penguatan Infrastruktur Sosial Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Pemantapan Satuan Permukiman.

Secara lengkap capaian kinerja setiap kegiatan sebagaimana Rencana Kerja tahun 2024 yang telah ditetapkan dapat dilihat pada tabel Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 di bawah ini:



Tabel T-C.29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra
Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo
sampai dengan Tahun 2025

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja/Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target program dan kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR									
2	DINAS TENAGA KERJA, ESDM DAN TRANSMIGRASI									
2 07 01	Program penunjang urusan pemerintahan daerah Provinsi	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100	100 %	100	100	100	100	100
2 07 01 1.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	24 Dokumen	6	6 Dokumen	6	100	6	18	75
2 07 01 1.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	2	4 Dokumen	4	100	2	10	125
2 07 01 1.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16 Dokumen	4	2 Dokumen	2	100	4	8	50
2 07 01 1.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangan	177 Orang	100	100 Orang	100	100	100	100	56
2 07 01 1.02 01	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	177 Orang	100	100 Orang	100	100	100	100	100
2 07 01 1.02 05	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah laporan akhir tahun SKPD	4 Laporan	1	1 Laporan	100	100	1	2	50
2 07 01 1.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan	84 Orang	10	100 Orang	100	1	13	100	119
2 07 01 1.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	84 Orang	10	100 Orang	0	0	13	100	119
2 07 01 1.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah sarana prasarana yang disediakan	80 paket	10						
2 07 01.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	80 paket	10	10 Paket	100	10	20	130	163
2 07 01 1.08	Kegiatan penyediaan jasa urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	1	1 Paket	100	100	1	100	100
	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	1	1 Paket	100	100	1	100	100
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor UPT BLK yang Disediakan	4 Laporan	1	1 Paket	100	100	1	100	100
	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase pencari kerja yang dilatih	100 %	22,44						
2 07 03 1.01	Kegiatan Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi	930 Orang	175						
2 07 03 1.01 01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi	750 orang	130	50 Orang	100	200	1	231	31
		Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi (UPTD Balai Latihan Kerja)	180 orang	45	30 Orang	100	333	1	146	81

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja/Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target program dan kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2 07 03 1.03	Kegiatan Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Menengah	Jumlah perusahaan menengah yang mendapatkan konsultasi peningkatan produktivitas	20 perusahaan	5						
2 07 03 1.03 01	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Menengah	Jumlah perusahaan menengah yang mendapatkan konsultasi peningkatan produktivitas	20 perusahaan	5						
2 07 03 1.04	Kegiatan Pengukuran produktivitas tingkat daerah provinsi	Jumlah dokumen hasil pengukuran produktivitas tenaga kerja	4 Dokumen	1						
2 07 03 1.04 01	Pengukuran kompetensi dan produktivitas tenaga kerja	Jumlah dokumen hasil pengukuran produktivitas dan daya saing tenaga kerja di tingkat daerah	4 Dokumen	1						
	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Jumlah pencari kerja dan pemberi kerja yang terdaftar	100 %	37,91						
2 07 04 1.03	Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah pencari kerja yang terdaftar dalam pasar kerja melalui sistem online (karirhub)	24.000 orang	9.099	6.000 Orang	214	100	6.000	39	0
2 07 04 1.03 02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah pencari kerja yang terdaftar dalam pasar kerja melalui sistem online (karirhub)	24.000 orang	9.099	6.000 Orang	214	100	6.000	39	0
	Program Hubungan Industrial	Persentase Jumlah Perusahaan yang dibina dalam pencegahan perselisihan hubungan industrial	100 %	25,00						
2 07 05 1.02	Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Kasus hubungan industrial yang diselesaikan	200 Kasus	12	50 Orang	100	50	50	162	81
2 07 05 1.02 02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Terselesaikannya Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Provinsi	200 Kasus	12	50 Kasus	100	50	50	162	81
	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/ Kota (UMSK)	Jumlah dokumen UMP yang ditetapkan	4 SK	1	1 SK	100	1	100	-	0
	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)	Jumlah penetapan UMP	4 SK	1	1 SK	100	1	100	-	0
	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Terdaftar dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	2.301 Orang	2.301	2.310 Orang	100	100	2.248	159	7
	Program Pengawasan Ketenagakerjaan	Persentase Jumlah perusahaan yang dibina dan diperiksa	68 %	30,56						
2 07 06 1.01	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma ketenagakerjaan	1.680 perusahaan	432						
2 07 06 1.01 01	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja diPerusahaan	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma kerja	1680 perusahaan	432	420 Perusahaan	240	57,14	396	5,05	0
	Program Pengelolaan Aspek Kegeologian	Persentase ketersediaan data zona konservasi dan pemanfaatan air tanah	56 %	29						
3 29 02 1.01	Kegiatan Penetapan zona konservasi air tanah pada cekungan air tanah dalam daerah provinsi	Jumlah data konservasi dan cekungan air tanah	4 Dokumen dan Peta	1						
3 29 02 1.01 02	Penentuan dan penetapan zona konservasi air tanah pada cekungan air tanah	Jumlah dokumen zona konservasi air tanah yang ditetapkan dalam daerah provinsi	4 Dokumen	1	1 Laporan	2	100,00	1	0	0

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja/Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target program dan kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3 29 02 1.03	Kegiatan Penetapan nilai perolehan air tanah dalam daerah provinsi	Jumlah laporan pengendalian dan pemanfaatan air tanah	4 Laporan	1	1 Laporan	2	100,00	1	0	0
3 29 02 1.03 03	Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan air tanah	Jumlah laporan hasil pengendalian dan pengawasan implementasi nilai perolehan air tanah dalam daerah provinsi	4 Laporan	1	1 Laporan	2	100,00	1	0	0
	Program Pengelolaan Mineral dan Batubara	Persentase pengawasan dan pembinaan usaha pertambangan	100 %	100						
3 29 03 1.03	Kegiatan Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah dokumen rekomendasi teknis pertambangan yang terbitkan dan diawasi	155 Dokumen	15	1 Laporan	15	10,00	1	0	0
3 29 03 1.03 03	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah dokumen rekomendasi pertambangan yang terbitkan	155 Dokumen	15	1 Laporan	15	10,00	1	0	0
3 29 03 1.01	Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah laporan hasil pengendalian dan pengawasan wilayah izin usaha pertambangan	4 Laporan	1	1 Laporan	2	50	1	0	0
3 29 03 1.01 03	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi atau Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	4 Laporan	1	1 Laporan	2	50	1	0	0
3 29 06	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	Persentase Jumlah Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang terpasang listrik	48 %	34,06						
3 29 06 1.02	Kegiatan Penatausahaan izin operasi yang fasilitas instalasinya dalam daerah provinsi	Jumlah rekomendasi izin operasi yang diterbitkan	8 Rekomendasi	6	2 Dokumen	2	8,00	2	0	0
3 29 06 1.02 02	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Jumlah surat Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Operasi yang di terbitkan	8 Rekomendasi	6	2 Dokumen	2	8,00	2	0	0
3 29 06 1.06	Kegiatan Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah Kepala keluarga Penerima Manfaat Dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	300 KK	516	60 KK	60	576,00	60	0	0
3 29 06 1.06 02	Penetapan Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Jumlah Kepala keluarga Penerima Manfaat Dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	300 Keluarga	516	60 KK	60	576,00	60	0	0
	Program Pengelolaan Energi Terbarukan	Persentase pemanfaatan potensi energi terbarukan	3,05 %	2,3						
3 29 05 1.04	Kegiatan Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi	Jumlah dokumen pengembangan Energi terbarukan	1 Dokumen	1						
3 29 05 1.04 04	Pengalokasian Anggaran untuk Program Konservasi Energi	Jumlah dokumen pengembangan Energi terbarukan	1 Dokumen	1						
3 29 05 1.04 07	Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi	Jumlah laporan pemantauan dan pembinaan pemanfaatan pembangkit EBT	1 Laporan	1						

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja/Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target program dan kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3.29.05.1.07	Kegiatan Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi	Jumlah dokumen pengelolaan Energi Baru Terbarukan	3 Dokumen							
3.29.05.1.07.02	Pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah	Jumlah laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah	3 Dokumen		1 Dokumen	1	33,00	1	0	0
3.29.05.1.08	Kegiatan Pengelolaan konservasi Energi terhadap kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi	Jumlah Dokumen Pengelolaan Konservasi Energi	3 Dokumen							
3.29.05.1.08.05	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan konservasi energi pada kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi	Jumlah laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan konservasi energi pada kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi	3 Dokumen		1 Laporan	1	33,00	1	0	0
	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Persentase pembangunan Satuan Permukiman Transmigrasi	100 %	100						
3 32 03 1.01	Kegiatan Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Satuan Permukiman Transmigrasi yang di bangun	4 SP	4						
3 32 03 1.01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi antar Pemerintah Daerah Kabupaten/kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	4 Dokumen	1	1 Laporan	1	25	4	2	50
3 32 03 1.01 17	Bantuan Non-Standar Transmigrasi (Dalam Bentuk Barang Sesuai Kearifan Lokal)	Jumlah Bantuan Non-Standar yang Diberikan kepada Transmigran	16 Paket	4						
	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Persentase peningkatan masyarakat transmigrasi pada tahap pemantapan	100 %	63						
3 32 04 1.01	Kegiatan Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan	Jumlah satuan permukiman transmigrasi yang dikembangkan	4 SP	4	4 SP	8	200	4	2	50
3 32 04 1.01 02	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam Rangka Pemantapan Satuan Permukiman	Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan	4 SP	4	4 SP	8	200	4	2	50



2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah analisis kinerja. Dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas Perangkat Daerah melakukan klarifikasi output dan outcome yang seharusnya dicapai sehingga memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

Analisis kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) yang dilaksanakan dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran kinerja ini dilakukan secara bulanan melalui mekanisme *e-Monev*, berkala (triwulan) dan tahunan, selanjutnya hasil pengumpulan data capaian kinerja dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja seperti pada tabel skala nilai peringkat kinerja sebagai berikut:

Tabel 2.2

Skala Analisis Capaian Kinerja

SKALA NILAI	KATEGORI CAPAIAN KINERJA
>100	Sangat Baik
>80 – 100	Baik
> 55 – 80	Sedang
< 55	Kurang

Pada tahun 2024, pengukuran kinerja dilakukan terhadap 7 (tujuh) Sasaran Strategis dengan menggunakan 7 (tujuh) Indikator Kinerja yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Dari ketujuh sasaran strategis pada Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo Tahun 2024, 4 (empat) sasaran strategis tidak mencapai target, 2 (dua) sasaran strategis telah mencapai target, dan 1 (satu) sasaran strategis telah melampaui target.

Pengukuran Tingkat capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dengan realisasinya. Tingkat capaian kinerja Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo tahun 2024 sebesar 95,16% dengan kategori **Baik**.





Capaian Kinerja pelayanan pada Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo dianalisis berdasarkan kinerja masing-masing urusan yang menjadi tugas pokok dinas yaitu:

a. Kinerja Urusan Tenaga Kerja

Kondisi ketenagakerjaan di Provinsi Gorontalo mulai dari Penduduk Usia Kerja berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo periode Agustus 2024 sebesar 932.926 orang. Jumlah ini mengalami kenaikan sebesar 1,37 persen atau naik sebanyak 12.653 orang dibandingkan periode Agustus 2023. Sebagian besar penduduk usia kerja merupakan Angkatan kerja yaitu 652.588 orang, sisanya termasuk bukan Angkatan kerja sebanyak 280.338 orang.

Komposisi angkatan kerja Provinsi Gorontalo pada Agustus 2024 terdiri dari 632.184 orang penduduk bekerja dan 20.404 orang pengangguran. Apabila dibandingkan Agustus 2023, jumlah angkatan kerja meningkat sebanyak 1.163 orang, penduduk bekerja bertambah sebanyak 663 orang, sementara pengangguran bertambah sebanyak 500 orang.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Provinsi Gorontalo mengalami fluktuasi sejak Agustus 2019 sampai dengan Agustus 2024. TPAK pada Agustus 2024 sebesar 69,95 persen, turun 0,84 persen poin dibanding Agustus 2023. TPAK adalah persentase banyaknya angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja. TPAK mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu negara/wilayah.

Berdasarkan jenis kelamin, pada Agustus 2024, TPAK laki-laki sebesar 84,50 persen, lebih tinggi dibanding TPAK perempuan yang sebesar 55,23 persen. Dibandingkan Agustus 2023, TPAK laki-laki dan perempuan mengalami penurunan, masing-masing sebesar 0,84 persen poin.

Tabel 2.3

Perkembangan Kondisi Ketenagakerjaan di Provinsi Gorontalo dalam 2 (dua) tahun terakhir

No.	Uraian/Indikator Ketenagakerjaan	2023			2024		
		L	P	Total	L	P	Total
1.	Penduduk	611.800	601.400	1.213.200	619.000	608.800	1.227.800





2.	Penduduk Usia Kerja	462.584	457.689	920.273	469.137	463.789	932.926
3.	Angkatan Kerja	394.783	256.642	651.425	396.431	256.157	652.588
	- Bekerja	383.759	247.762	631.521	386.009	246.175	632.184
	- Pengangguran	11.024	8.880	19.904	10.422	9.982	20.404
4.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	2,79	3,46	3,06	2,63	3,90	3,13
5.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	85,34	56,07	70,79	84,50	55,23	69,95

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2024

Indikator utama ketenagakerjaan yang sering digunakan sebagai indikator keberhasilan dalam menangani masalah ketenagakerjaan khususnya pengangguran adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Tingkat Pengangguran Terbuka merupakan perbandingan antara jumlah penganggur terhadap jumlah Angkatan kerja. TPT Provinsi Gorontalo pada Agustus 2024 sebesar 3,13 persen.

Pada tahun 2024 kinerja urusan ketenagakerjaan yang telah dicapai berdasarkan masing-masing sasaran adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4

Capaian Kinerja Urusan Ketenagakerjaan Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya jumlah serapan tenaga kerja	- Persentase peningkatan jumlah serapan tenaga kerja	26,5%	24,23%	91,43%
2	Meningkatnya kondisi hubungan industrial yang kondusif	- Persentase kasus perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan	100%	100%	100%
3	Meningkatnya ketaatan terhadap pelaksanaan norma ketenagakerjaan	- Persentase jumlah perusahaan yang menerapkan norma ketenagakerjaan	3,49%	5,45%	156,16%





No	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target	Realisasi	Capaian
4	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi	- Nilai SAKIP DINAS TENAGA KERJA, ESDM DAN TRANSMIGRASI	BB	BB	100%

Sasaran 1 : Meningkatkan Jumlah Serapan Tenaga Kerja

Indikator kinerja sasaran ini adalah persentase peningkatan jumlah serapan tenaga kerja dengan target tahun 2024 sebesar 26,5%. Dalam mengukur capaian sasaran ini adalah dengan membandingkan jumlah pencari kerja yang ditempatkan tahun n dan tahun n-1. Pada tahun 2024, tercatat bahwa jumlah pencari kerja yang ditempatkan sebanyak 7.096 orang, sedangkan capaian jumlah pencari kerja yang ditempatkan tahun sebelumnya adalah 5.712 orang. Dari data tersebut, maka didapatkan capaian persentase peningkatan jumlah serapan tenaga kerja sebesar 24,23%.

Sasaran 2 : Meningkatkan Kondisi Hubungan Industrial yang kondusif

Indikator kinerja sasaran ini adalah Persentase kasus perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan sebesar 100%. Dalam mengukur capaian sasaran ini adalah dengan membandingkan jumlah kasus perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan dengan jumlah kasus perselisihan hubungan industrial yang dilaporkan ke Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo. Pada tahun 2024, tercatat bahwa jumlah kasus perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan sebanyak 4 kasus dan jumlah jumlah kasus perselisihan hubungan industrial yang dilaporkan sebanyak 4 orang. Hal tersebut menggambarkan pencapaian persentase kasus perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan yaitu sebesar 100%

Sasaran 3 : Meningkatkan Ketaatan terhadap pelaksanaan norma ketenagakerjaan

Indicator kinerja sasaran ini adalah Persentase jumlah perusahaan yang menerapkan norma ketenagakerjaan sebesar 3,49 %. Dalam mengukur capaian sasaran ini adalah dengan membandingkan jumlah Perusahaan yang





menerapkan norma ketenagakerjaan dengan jumlah Perusahaan yang terdaftar pada WLKP Online. Pada tahun 2024, tercatat bahwa jumlah Perusahaan yang menerapkan norma ketenagakerjaan sebanyak 240 perusahaan dan jumlah Perusahaan yang terdaftar pada WLKP Online sebanyak 4.405 perusahaan. Hal tersebut menggambarkan pencapaian persentase jumlah perusahaan yang menerapkan norma ketenagakerjaan yaitu sebesar 5,45%.

Sasaran 4 : Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi

Indikator kinerja sasaran ini adalah Nilai SAKIP DTKESDMT dengan target nilai BB. Dalam mengukur capaian sasaran ini adalah berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi SAKIP oleh Inspektorat Provinsi Gorontalo. Pada tahun 2024, SAKIP yang dievaluasi adalah SAKIP Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo tahun 2023. Hasil penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang evaluasi di lingkungan Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo memperoleh nilai sebesar 78,11 dengan predikat BB (Sangat Baik).

b. Urusan Energi Sumber Daya Mineral

Urusan Energi Sumberdaya Mineral pada Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi dilaksanakan oleh Bidang Energi Sumberdaya Mineral. Sasaran utama yang ingin dicapai Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral adalah Meningkatnya jangkauan dan kualitas infrastruktur ketenagalistrikan serta Pembangunan Rendah Karbon.

Pada tahun 2024 kinerja urusan ESDM yang telah dicapai berdasarkan masing-masing sasaran adalah sebagai berikut :





Tabel 2.5

Capaian Kinerja Urusan ESDM Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatnya Jangkauan dan Kualitas Infrastruktur Ketenaga Listrik	- Persentase Jumlah Rumah Tangga terpasang Listrik	39,74%	34,96%	87,97%
2	Pembangunan Rendah Karbon	- Persentase bauran energi terbarukan	13,58%	12,35%	90,94%

Sasaran 1 : Pembangunan Rendah Karbon

Indikator kinerja sasaran ini adalah persentase bauran energi terbarukan dengan target tahun 2024 sebesar 13,58%. Dalam mengukur capaian sasaran ini adalah dengan membandingkan jumlah realisasi pemanfaatan energi dari sektor EBT dengan jumlah total pemanfaatan energi.

Tercatat data bauran energi sebagai berikut : Capaian porsi EBT 12,35%, minyak bumi sebesar 53,14 %, gas bumi sebesar 13,64% dan batubara sebesar 20,87%. Dari data tersebut menggambarkan bahwa capaian tahun 2024 tidak mencapai target atau sebesar 90,94%.

Sasaran 2 : Meningkatkan Jangkauan dan Kualitas Infrastruktur Ketenagalistrikan

Indikator kinerja sasaran ini adalah persentase Persentase Jumlah Rumah tangga terpasang listrik sebesar 39,74%. Dalam mengukur capaian sasaran ini adalah dengan membandingkan jumlah Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang terpasang Listrik dan jumlah rumah tangga sasaran yang belum berlistrik.

Data awal Renstra Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo tercatat bahwa jumlah Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang belum berlistrik sebanyak 7.255 RTS. Jumlah rumah tangga sasaran yang mendapatkan instalasi Listrik gratis pada tahun 2024 sebanyak 65 RTS, sehingga rumah tangga sasaran yang telah terpasang Listrik sampai dengan tahun 2024 yaitu sebanyak 2.536 RTS. Hal tersebut menggambarkan capaian





Persentase jumlah Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang terpasang Listrik sebesar 34,96%.

Adapun data Rumah tangga sasaran yang terpasang Listrik melalui program kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo selang tahun 2018 s/d 2024 sebagaimana berikut :

Tabel 2.6

Pemasangan Instalasi Listrik Bagi Rumah Tangga Tidak Mampu
Tahun 2018-2024

No	Kabupaten/Kota	Tahun Anggaran						
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Kabupaten Pohuwato	32	129	-	24	-	6	-
2	Kabupaten Boalemo	37	125	-	59	41	45	8
3	Kabupaten Gorontalo Utara	6	43	-	16	-	131	29
4	Kabupaten Gorontalo	103	413	24	263	311	179	18
5	Kabupaten Bone Bolango	53	83	11	71	9	137	8
6	Kota Gorontalo	4	57	10	17	14	18	2
Jumlah		235	850	45	450	375	516	65
Total s/d tahun 2024		2.536 RTS						

Sumber: Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo Tahun 2024

Kondisi Desa berlistrik baik PLN dan Non PLN sampai dengan tahun 2024 adalah sebagai berikut:





Tabel 2.7

Rasio Desa Yang Teraliri Listrik Tahun 2024

NO	KABUPATEN	JUM. KEC	JUMLAH DESA/KELURAHAN BERLISTRIK				BELUM BERLISTRIK
			KEL/DESA	LISTRIK PLN	LISTRIK NON PLN	TOTAL BERLISTRIK	
1	Kab. Boalemo	7	86	86	0	86	-
2	Kab. Bone Bolango	18	165	160	5	165	-
3	Kab. Gorontalo	19	201	201	0	201	-
4	Kab. Gorontalo Utara	11	123	122	1	123	-
5	Kab. Pohuwato	13	104	104	0	104	-
6	Kota Gorontalo	9	50	50	0	50	-
Provinsi Gorontalo		77	729	723	6	723	

Sumber: Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo Tahun 2024

c. Urusan Transmigrasi

Urusan Transmigrasi pada Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi dilaksanakan oleh Bidang Transmigrasi. Pada tahun 2024 kinerja urusan ESDM yang telah dicapai berdasarkan masing-masing sasaran adalah sebagai berikut :

Tabel 2.8

Capaian Kinerja Urusan Transmigrasi Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Meningkatnya ekonomi pedesaan berbasis potensi lokal dengan pendekatan klaster Kawasan strategis	- Persentase jumlah Masyarakat transmigrasi yang dikembangkan	91,34%	36,22%	39,65%

Sasaran 1 : Meningkatkan Ekonomi Pedesaan Berbasis Potensi Lokal dengan Pendekatan Klaster Kawasan Strategis

Indikator kinerja sasaran ini adalah persentase jumlah Masyarakat transmigrasi yang dikembangkan dengan target tahun 2024 sebesar 91,34%. Dalam mengukur capaian sasaran ini adalah dengan membandingkan jumlah Masyarakat transmigrasi yang dikembangkan dan jumlah Masyarakat





transmigrasi binaan. Pada tahun 2024, tercatat bahwa jumlah Masyarakat transmigrasi yang dikembangkan sebanyak 230 KK dan jumlah Masyarakat transmigrasi binaan sebanyak 635 KK. Hal tersebut menggambarkan pencapaian persentase jumlah Masyarakat transmigrasi yang dikembangkan yaitu sebesar 36,22% (tidak mencapai target yang ditetapkan). Hal ini dikarenakan terbatasnya anggaran pelaksanaan program kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Tenaga Kerja ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo dapat dilihat pada tabel berikut ini:



Tabel T-C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi
Provinsi Gorontalo

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian				Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah			100%	100%	100%	100%	100%	100%	50%		
2	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah			6 Dok	6 Dok	6 Dok	6 Dok	6 Dok	6 Dok	6 Dok		
3	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			4 Dok	4 Dok	4 Dok	4 Dok	4 Dok	4 Dok	2 Dok		
4	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	4 Dok		
5	Jumlah ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangannya			177 Orang	177 Orang	177 Orang	177 Orang	100 Orang	100 Orang	100 Orang		
6	<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>			177 Orang	177 Orang	177 Orang	177 Orang	100 Orang	100 Orang	100 Orang		
7	<i>Jumlah laporan akhir tahun SKPD</i>			1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap		
8	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan			21 Orang	21 Orang	21 Orang	21 Orang	21 Orang	0%	13 Orang		
9	<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>			21 Orang	21 Orang	21 Orang	21 Orang	21 Orang	0%	13 Orang		
10	Jumlah sarana prasarana yang disediakan			10 paket	10 paket	10 paket	10 paket	10 paket	10 paket	20 paket		
11	<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>			10 paket	10 paket	10 paket	10 paket	10 paket	10 paket	20 paket		

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian				Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
22	Persentase jumlah pencari kerja dan pemberi kerja yang terdaftar			25%	25%	25%	25%	25%	214%	39%		
23	Jumlah pencari kerja yang terdaftar dalam pasar kerja melalui sistem online (karirhub)			6000 Orang	6000 Orang	6000 Orang	6000 Orang	9099 Orang	6000 Orang	2.323Orang		
24	Jumlah pencari kerja yang terdaftar dalam pasar kerja melalui sistem online (karirhub)			6000 Orang	6000 Orang	6000 Orang	6000 Orang	9099 Orang	6000 Orang	2.323Orang		
25	Persentase Jumlah Perusahaan yang dibina dalam pencegahan perselisihan hubungan industri			25%	25%	25%	25%	25,00%	0,00%	5,05%		
26	Jumlah Kasus hubungan industrial yang diselesaikan			50 kasus	50 kasus	50 kasus	50 kasus	12 kasus	0	0		
27	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan			50 kasus	50 kasus	50 kasus	50 kasus	12 kasus	0	0		
28	Jumlah dokumen UMP yang ditetapkan			1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen		
29	Jumlah penetapan UMP			1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen		
30	Jumlah Tenaga Kerja yang Terdaftar dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan			4.317 Orang	4.317 Orang	4.317 Orang	4.317 Orang	2.301 Orang	2.301 Orang	2.248 Orang		
31	Persentase jumlah perusahaan yang dibina dan diperiksa			17%	17%	17%	17%	30,56%	57,14%	5,05%		
32	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma ketenagakerjaan			420 Orang	420 Orang	420 Orang	420 Orang	420 Orang	420 Orang	396 Orang		

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian				Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
33	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma kerja			420 Orang	420 Orang	420 Orang	420 Orang	432 Orang	420 Orang	19 Orang		
34	Persentase ketersediaan data zona konservasi dan pemanfaatan air tanah			29%	43%	57%	71%	29%	100%	0%		
35	Jumlah data konservasi dan cekungan air tanah			1 Dokumen dan Peta	1 Dokumen dan Peta	1 Dokumen dan Peta	1 Dokumen dan Peta	1 Dokumen dan Peta	1 Dokumen dan Peta	1 Dokumen dan Peta		
36	Jumlah dokumen zona konservasi air tanah yang ditetapkan dalam daerah provinsi			1 Dokumen dan Peta	1 Dokumen dan Peta	1 Dokumen dan Peta	1 Dokumen dan Peta	1 Dokumen dan Peta	1 Dokumen dan Peta	1 Dokumen dan Peta		
37	Jumlah laporan pengendalian dan pemanfaatan air tanah			1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan		
38	Jumlah laporan hasil pengendalian dan pengawasan implementasi nilai perolehan air tanah dalam daerah provinsi			1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan		
39	Persentase pengawasan dan pembinaan usaha pertambangan			100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%		
40	Jumlah dokumen rekomendasi teknis pertambangan yang terbitkan dan diawasi			30 dokumen	35 dokumen	40 dokumen	50 dokumen	15 dokumen	2 dokumen	1 Laporan		
41	Jumlah dokumen rekomendasi pertambangan yang terbitkan			30 dokumen	35 dokumen	40 dokumen	50 dokumen	15 dokumen	2 dokumen	1 Laporan		

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian				Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
42	Jumlah laporan hasil pengendalian dan pengawasan wilayah izin usaha pertambangan			1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan		
43	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan			1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan		
44	Persentase Jumlah Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang terpasang listrik			33,34%	39,74%	43,87%	48,00%	34,06%	3,33%	0,00%		
45	Jumlah rekomendasi izin operasi yang diterbitkan			2 rekomendasi	2 rekomendasi	2 rekomendasi	2 rekomendasi	6 rekomendasi	3 Dokumen	2 Dokumen		
46	Jumlah surat Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Operasi yang di terbitkan			2 Rekomendasi	2 rekomendasi	2 rekomendasi	2 rekomendasi	6 rekomendasi	3 Dokumen	2 Dokumen		
47	Jumlah Kepala keluarga Penerima Manfaat Dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu			516 KK	300 KK	300 KK	300 KK	516 KK	0 KK	0 KK		
48	Jumlah Kepala keluarga Penerima Manfaat Dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu			516 Keluarga	300 Keluarga	300 Keluarga	300 Keluarga	516 Keluarga	0 Keluarga	60 Keluarga		
49	Persentase pemanfaatan potensi energi terbarukan			1,86%	2,40%	2,94%	3,05%	2,30%	100,00%	0,00%		
50	Jumlah dokumen pengembangan Energi terbarukan			1 Dokumen				1 Dokumen	1 Dokumen	1 Laporan		
51	Jumlah dokumen pengembangan Energi terbarukan			1 Dokumen				1 Dokumen	1 Dokumen	1 Laporan		
52	Jumlah laporan pemantauan dan pembinaan pemanfaatan pembangkit EBT			1 Laporan				1 Laporan	1 Dokumen	1 Laporan		

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian				Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
53	Jumlah dokumen pengelolaan Energi Baru Terbarukan				1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen	0 Dokumen		
54	Jumlah laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah				1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan		1 Dokumen	2 Dokumen		
55	Jumlah Dokumen Pengelolaan Konservasi Energi				1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen	0 Laporan		
56	Jumlah laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan konservasi energi				1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan		
57	Persentase pembangunan Satuan Permukiman Transmigrasi			100%	100%	100%	100%	100%	100%	75%		
58	Jumlah Satuan Permukiman Transmigrasi yang di bangun			4 SP	4 SP	4 SP	4 SP	4 SP	4 SP	2 SP		
59	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi			1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan		
60	Jumlah Bantuan Non-Standar yang Diberikan kepada Transmigran			4 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket	0	0		

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian				Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
61	Persentase peningkatan masyarakat transmigrasi pada tahap pematangan			63%	79%	94%	100%	63%	50%	50%		
62	Jumlah satuan permukiman transmigrasi yang dikembangkan			4 SP	4 SP	4 SP	4 SP	4 SP	4 SP	2 SP		
63	Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan			4 SP	4 SP	4 SP	4 SP	4 SP	4 SP	2 SP		



2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

- a. Isu-isu strategis yang berkaitan langsung dengan urusan Ketenagakerjaan antara lain adalah sebagai berikut :
 1. Tingginya Angka Pengangguran
 2. Rendahnya Tingkat partisipasi Angkatan kerja perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya
- b. Isu-isu strategis yang berkaitan langsung dengan urusan ESDM antara lain adalah sebagai berikut:
 1. Belum meratanya akses listrik bagi Rumah Tangga Miskin
 2. Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan pengelolaan pertambangan rakyat
- c. Isu-isu strategis yang berkaitan langsung dengan urusan Ketransmigrasian antara lain adalah sebagai berikut :
 1. Belum optimalnya penyelesaian permasalahan lahan dan penerbitan Sertifikat Hak Milik

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap Dokumen rancangan awal RKPD Provinsi Gorontalo, Rancangan Program/Kegiatan yang tertuang dalam Rancangan Awal RKPD Provinsi Gorontalo Tahun 2026 telah mengacu pada Permendagri nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Kepmendagri 050-5889 tahun 2022 tentang Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Kebutuhan dana untuk pelaksanaan program kegiatan belum tertuang pada rancangan awal RKPD tahun 2026. Rancangan Program/Kegiatan yang tertuang dalam Rancangan Awal RKPD Provinsi Gorontalo Tahun 2026 telah sesuai dengan rancangan program kegiatan yang diusulkan pada Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo Tahun 2026. Berikut ini tabel Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2026.



TABEL T-C.31
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2025
DINAS TENAGA KERJA, ESDM DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI GORONTALO

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					NO	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA		PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	7
1	Program Pengelolaan Aspek Kegeologian	Provinsi Gorontalo	Luas Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah di Wilayah Sungai Lintas Kabupaten/Kota	59		1	Program Pengelolaan Aspek Kegeologian	Provinsi Gorontalo	Luas Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah di Wilayah Sungai Lintas Kabupaten/Kota	59	67.000.000	
2	Program Pengelolaan Mineral dan Batubara	Provinsi Gorontalo	Jumlah Rekomendasi terhadap Usulan IPR	10		2	Program Pengelolaan Mineral dan Batubara	Provinsi Gorontalo	Jumlah Rekomendasi terhadap Usulan IPR	10	90.000.000	
3	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	Provinsi Gorontalo	Persentase jumlah Rumah tangga sasaran yang	60,96%		3	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	Provinsi Gorontalo	Persentase jumlah Rumah tangga sasaran yang	60,96%	312.387.000	
4	Program Pengelolaan Energi Terbarukan	Provinsi Gorontalo	Porsi EBT dalam Bauran Energi	15,40%		3	Program Pengelolaan Energi Terbarukan	Provinsi Gorontalo	Porsi EBT dalam Bauran Energi	15,40%	85.280.000	
Urusan Energi Sumber Daya Mineral					-	Urusan Energi Sumber Daya Mineral					554.667.000	
4	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Provinsi Gorontalo	Persentase Transmigran yang Dibina dan Diberdayakan	18,87%		4	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Provinsi Gorontalo	Persentase Transmigran yang Dibina dan Diberdayakan	18,87%	100.000.000	
5	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Provinsi Gorontalo	Persentase Luas Kawasan Transmigrasi yang Berkembang	15%		5	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Provinsi Gorontalo	Persentase Luas Kawasan Transmigrasi yang Berkembang	15%	100.000.000	
Urusan Ketransmigrasian					-	Urusan Ketransmigrasian					200.000.000	
6	Program Hubungan Industrial	Provinsi Gorontalo	Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial	21369		6	Program Hubungan Industrial	Provinsi Gorontalo	Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial	21369	957.188.000	
7	Program Pengawasan Ketenagakerjaan	Provinsi Gorontalo	Jumlah Tenaga Kerja yang Terlindungi Hak-Hak Dasarnya	21389		7	Program Pengawasan Ketenagakerjaan	Provinsi Gorontalo	Jumlah Tenaga Kerja yang Terlindungi Hak-Hak Dasarnya	21389	100.000.000	
8	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Provinsi Gorontalo	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan dalam negeri hasil pelatihan kerja	50%		8	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Provinsi Gorontalo	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan dalam negeri hasil pelatihan kerja	50%	432.212.000	
9	Program Penempatan Tenaga Kerja	Provinsi Gorontalo	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri	55,60%		9	Program Penempatan Tenaga Kerja	Provinsi Gorontalo	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri	55,60%	253.000.000	
10	Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Provinsi Gorontalo	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100%		9	Program Penempatan Tenaga Kerja	Provinsi Gorontalo	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	15.743.873.000	
Urusan Ketenagakerjaan					-	Urusan Ketenagakerjaan					17.486.273.000	



2.5. Telaah Usulan Progam dan Kegiatan Masyarakat

Program/kegiatan usulan pemangku kepentingan sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 merupakan suatu hasil kajian yang diusulkan pemangku kepentingan sebagai bagian dari pendekatan perencanaan menggunakan system perencanaan bawah atas (bottom-up planning) berdasarkan asas demokratisasi dan desentralisasi, baik dari kelompok masyarakat, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari perangkat daerah Kabupaten/Kota maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi perangkat daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada perangkat daerah. Untuk selanjutnya dilakukan penelaahan kesesuaian usulan terkait dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dan mengakomodasi usulan sesuai dengan program/kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah.

Berdasarkan hasil penelaahan pokok-pokok pikiran dimaksud serta memperhatikan kesesuaian program/kegiatan yang ada, maka usulan pemangku kepentingan diakomodirkan sebagaimana table berikut :



TABEL T-C.32
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2026
DINAS TENAGA KERJA, ESDM DAN TRANSMIGRASI PROVINSI GORONTALO

No.	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Program Hubungan Industrial	Provinsi Gorontalo	Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial		
	- Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektor Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektor Kabupaten/Kota (UMSK)				
	- Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Provinsi Gorontalo	Jumlah Tenaga Kerja yang Terdaftar dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	100 Orang	1 Usulan
2	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	Provinsi Gorontalo	Persentase jumlah Rumah tangga sasaran yang mendapat sambungan listrik		
	- Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan		Jumlah Kepala keluarga Penerima Manfaat Dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu		
	- Penetapan Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Kabupaten/Kota	Jumlah Kepala keluarga Penerima Manfaat Dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	68 Keluarga	11 Usulan



BAB III

TUJUAN dan SASARAN

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Dalam rangka terwujudnya Pembangunan daerah di bidang ketenagakerjaan, ESDM dan ketransmigrasian serta perumusan tujuan dan sasaran Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi selain didasarkan pada rumusan-rumusan penting penyelenggaraan tugas dan fungsi sebagai OPD di Pemerintah Provinsi Gorontalo yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra juga dilakukan penelaah terhadap kebijakan nasional.

Kebijakan nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026 yaitu "Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif". Tema tersebut menjadi landasan dalam mencapai 8 (delapan) Prioritas Nasional (PN) yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029. Prioritas Nasional yang menjadi acuan bagi Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi dalam melaksanakan tugas dan fungsi adalah :

1. Prioritas Nasional 2 :

'Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru'

2. Prioritas Nasional 3 :

'Melanjutkan Pembangunan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industry kreatif serta mengembangkan agromaritim industry di sentra produksi'

3. Prioritas Nasional 4 :

'Memperkuat Pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, Pendidikan, Kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender serta penguatan peran Perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z) dan penyandang disabilitas'





4. Prioritas Nasional 6 :

'Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan'

3.2. Tujuan dan Sasaran

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD, serta mengacu pada tujuan dan sasaran target kinerja Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029. Tujuan pelaksanaan pembangunan yang akan dicapai Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo pada kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang yaitu :

Meningkatkan Kesempatan dan Produktivitas Tenaga Kerja, Pemanfaatan Potensi Energi dan Sumber Daya Mineral yang Berkelanjutan serta Penyelenggaraan Transmigrasi yang Terpadu dan Berdaya Saing untuk Mendukung Pembangunan Daerah.

Sasaran strategis jangka menengah adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Adapun sasaran yang akan menjadi indikator atau ukuran keberhasilan dalam pelaksanaan program Pembangunan Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo, yaitu:

1. Meningkatnya jumlah serapan tenaga kerja
2. Meningkatnya kondisi hubungan industrial yang kondusif
3. Meningkatnya ketaatan terhadap pelaksanaan norma ketenagakerjaan
4. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan listrik bagi masyarakat
5. Meningkatnya pengelolaan sumber daya mineral secara optimal
6. Meningkatnya ekonomi pedesaan berbasis potensi lokal dengan pendekatan klaster kawasan strategis

3.3. Program Kegiatan

Program kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

- a. Sasaran *meningkatnya jumlah serapan tenaga kerja* dengan indikator kinerjanya *Persentase peningkatan jumlah serapan tenaga kerja* dapat





direalisasikan dengan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

1. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja

Kegiatan Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi, dengan sub kegiatan :

- Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi

2. Program Penempatan Tenaga Kerja

Kegiatan Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :

- Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan

Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja, dengan sub kegiatan :

- Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online

3. Program penunjang urusan pemerintahan daerah Provinsi

Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :

- Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
- Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :

- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Kegiatan penyediaan jasa urusan pemerintahan daerah, dengan sub kegiatan :

- Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

- b. Sasaran *Meningkatnya kondisi hubungan industrial yang kondusif* dengan indikator kinerjanya *Persentase kasus perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui perjanjian bersama* dapat direalisasikan dengan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

1. Program Hubungan Industrial





Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi, dengan sub kegiatan :

- Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi

Kegiatan Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK), dengan sub kegiatan :

- Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)
- Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja

- c. Sasaran *Meningkatnya ketaatan terhadap pelaksanaan norma ketenagakerjaan*, dengan indikator kinerjanya *Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan bidang ketenagakerjaan* dapat direalisasikan dengan melaksanakan program kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

1. Program Pengawasan Ketenagakerjaan

Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan, dengan sub kegiatan :

- Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan

- d. Sasaran *Meningkatnya pemenuhan kebutuhan Listrik bagi masyarakat*, dengan indikator kinerjanya *Jumlah Rumah Tangga Sasaran yang terpenuhi kebutuhan listrik* dapat direalisasikan dengan melaksanakan program kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

1. Program Pengelolaan Ketenagalistrikan

Kegiatan Penatausahaan izin operasi yang fasilitas instalasinya dalam daerah provinsi, dengan sub kegiatan :

- Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi





Kegiatan Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan, dengan sub kegiatan:

- Penetapan Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu

2. Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan

Kegiatan Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi, dengan sub kegiatan :

- Pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah

Kegiatan Pengelolaan Konservasi Energi terhadap kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi, dengan sub kegiatan :

- Monitoring dan evaluasi pelaksanaan konservasi energi pada kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi

- e. Sasaran *Meningkatnya pengelolaan sumber daya mineral secara optimal*, dengan indikator kinerjanya *Persentase usaha tambang sesuai Provinsi kewenangan yang tidak melanggar* dapat direalisasikan dengan melaksanakan program kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

1. Program Pengelolaan Aspek Kegeologian

Kegiatan Penetapan nilai perolehan air tanah dalam daerah provinsi, dengan sub kegiatan :

- Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan air tanah

2. Program Pengelolaan Mineral dan Batubara

Kegiatan Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil, dengan sub kegiatan :

- Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil

- f. Sasaran *Meningkatnya ekonomi pedesaan berbasis potensi lokal dengan pendekatan klaster kawasan strategis*, dengan indikator kinerjanya *Jumlah*





Kawasan transmigrasi yang dikembangkan dapat direalisasikan dengan melaksanakan program kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

1. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi

Kegiatan Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi, dengan sub kegiatan :

- Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi antar Pemerintah Daerah Kabupaten/kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi

2. Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi

Kegiatan Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pematapan, dengan sub kegiatan :

- Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam Rangka Pematapan Satuan Pemukiman





BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Adapun Program Kegiatan Dinas Tenaga Kerja, ESDM, Transmigrasi Provinsi Gorontalo yang akan dilaksanakan pada Tahun 2026 sebagaimana berikut:

A. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan

- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (UPTD BLK)

Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan:

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan

- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan

- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor





2. PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA

Kegiatan Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi

Sub Kegiatan

- Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi (UPTD BLK)

Kegiatan Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi

Sub Kegiatan

- Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi

3. PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA

Kegiatan Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan

- Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan

Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja

Sub Kegiatan

- Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online

4. PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL

Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi

Sub Kegiatan:

- Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi

Kegiatan Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)

Sub Kegiatan

- Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)
- Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja





5. PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN

Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan

Sub Kegiatan:

- Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan

B. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

1. PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN

Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi

Sub Kegiatan:

- Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan air tanah

2. PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA

Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil

Sub Kegiatan:

- Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil

3. PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN

Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi

Sub Kegiatan:

- Pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi di daerah)

Pengelolaan konservasi Energi terhadap kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi

Sub Kegiatan:

- Monitoring dan evaluasi pelaksanaan konservasi energi pada kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi





4. PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN

Kegiatan Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan

Sub Kegiatan:

- a. Penetapan Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu

Penatausahaan izin operasi yang fasilitas instalasinya dalam daerah provinsi

Sub Kegiatan:

- a. Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi

C. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI

1. PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI

Kegiatan Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi

Sub Kegiatan:

- a. Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi antar Pemerintah Daerah Kabupaten/kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi

2. PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI

Kegiatan Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan

Sub Kegiatan:

- a. Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam Rangka Pemantapan Satuan Permukiman

Adapun Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo sebagaimana tertera pada Tabel berikut:



**PENETAPAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) DINAS TENAGA KERJA, ESDM DAN TRANSMIGRASI PROVINSI GORONTALO
TAHUN 2026**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL					DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		DINAS TENAGA KERJA, ESDM DAN TRANSMIGRASI						17.910.940.000,00								10.440.911.200,00	
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						17.156.273.000,00								8.654.911.200,00	
	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA						17.156.273.000,00								8.654.911.200,00	
1,	2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						15.563.873.000,00						-		4.533.864.324,00	
		[Meningkatkan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan]	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100	100	100	100	15.563.873.000,00	-	-	-	-	-	100		4.533.864.324,00	-
	2.07.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				245.293.000,00	2 Dokumen 4 Dokumen					-		524.956.150,00	DINAS TENAGA KERJA, ESDM DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah															
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					153.284.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	2 Dokumen		274.427.200,00	DINAS TENAGA KERJA, ESDM DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah															
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					92.009.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	4 Laporan		250.528.950,00	DINAS TENAGA KERJA, ESDM DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-				12.548.442.400,00	1 Laporan 100 Orang					-		108.908.174,00	DINAS TENAGA KERJA, ESDM DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN															
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					12.488.442.400,00	100 Orang/ Bulan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	100 Orang/ Bulan	13.492.174.000,00	DINAS TENAGA KERJA, ESDM DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD															
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					60.000.000,00	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	1 Laporan	95.416.000,00	DINAS TENAGA KERJA, ESDM DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-				959.368.000,00	20 Paket					-		1.900.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, ESDM DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor															
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					959.368.000,00	20 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	20 Paket	1.900.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, ESDM DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-				1.810.769.600,00	1 Laporan					-		2.000.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, ESDM DAN TRANSMIGRASI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.07.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					1 Laporan	1.810.769.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	1 Laporan	2.000.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, ESDM DAN TRANSMIGRASI
2.	2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA						282.212.000,00						-	1.650.000.000,00	
		[Meningkatkan produktivitas tenaga kerja melalui pelatihan kerja]	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan dalam negeri hasil pelatihan kerja	50	36.77	50	50	282.212.000,00	-	-	-	-	50	1.650.000.000,00	-	
	2.07.03.1.01	Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n	-			125 Orang	282.212.000,00						190 Orang	1.650.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, ESDM DAN TRANSMIGRASI
	2.07.03.1.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi														
			Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n				125 Orang	282.212.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	190 Orang	1.650.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, ESDM DAN TRANSMIGRASI
3.	2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA						253.000.000,00						-	303.710.500,00	
		[Meningkatkan penempatan tenaga kerja]	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri	55.60	55.60	55.60	55.60	253.000.000,00	-	-	-	-	55.60	303.710.500,00	-	
	2.07.04.1.01	Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah tenaga kerja disabilitas yang mendapatkan fasilitasi layanan ULD	-			200 Orang	130.000.000,00							108.500.000,00	DINAS TENAGA KERJA, ESDM DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.1.01.0006	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan														
			Jumlah tenaga kerja disabilitas yang mendapatkan fasilitasi layanan ULD				200 Orang	130.000.000,00	Kota Gorontalo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	200 Orang	108.500.000,00	DINAS TENAGA KERJA, ESDM DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.1.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja Yang Terdaftar Dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (KarirHub)	-			12903 Orang	123.000.000,00						12903 Orang	195.210.500,00	DINAS TENAGA KERJA, ESDM DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.1.03.0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online														
			Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja Yang Terdaftar Dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (KarirHub)				12903 Orang	123.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	12903 Orang	195.210.500,00	DINAS TENAGA KERJA, ESDM DAN TRANSMIGRASI
4.	2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL						957.188.000,00						-	1.547.336.376,00	
		[Meningkatnya Pekerja yang Terlindungi]	Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial	22169	22000	21169	21369	957.188.000,00	-	-	-	-	21569	1.547.336.376,00	-	
	2.07.05.1.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan	-			5 Perkara	100.000.000,00						5 Perkara	200.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, ESDM DAN TRANSMIGRASI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.07.05.1.02.0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi														
			<i>Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan</i>				5 Perkara	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	5 Perkara	200.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, ESDM DAN TRANSMIGRASI
	2.07.05.1.03	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)	<i>Jumlah Tenaga Kerja yang Terdaftar dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan</i> <i>Jumlah Penetapan UMP</i>	-			5818 Orang 1 SK	857.188.000,00			-	-	-	5818 Orang 1 SK	1.347.336.376,00	DINAS TENAGA KERJA, ESDM DAN TRANSMIGRASI
	2.07.05.1.03.0001	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)														
			<i>Jumlah Penetapan UMP</i>				1 Surat Keputusan	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	1 Surat Keputusan	330.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, ESDM DAN TRANSMIGRASI
	2.07.05.1.03.0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja														
			<i>Jumlah Tenaga Kerja yang Terdaftar dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan</i>				5818 Orang	757.188.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	5818 Orang	1.017.336.376,00	DINAS TENAGA KERJA, ESDM DAN TRANSMIGRASI
5,	2.07.06	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN														
		[Terlindunginya hak-hak pekerja]	<i>Jumlah Tenaga Kerja yang Terlindungi Hak-Hak Dasarnya</i>	22229	21179	21389	100.000.000,00	-	-	-	-	-	-	21599	620.000.000,00	-
	2.07.06.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	<i>Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan (Termasuk Perusahaan yang Mempekerjakan TKA)</i>	-			4845 Perusahaan	100.000.000,00			-	-	-	5065 Perusahaan	620.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, ESDM DAN TRANSMIGRASI
	2.07.06.1.01.0001	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan														
			<i>Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan (Termasuk Perusahaan yang Mempekerjakan TKA)</i>				4845 Perusahaan	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	5065 Perusahaan	620.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, ESDM DAN TRANSMIGRASI
3		URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN														
	3.29	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL														
1,	3.29.02	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLAGIAN														
		[Meningkatnya Tata Kelola Kegeologian]	<i>Luas Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah di Wilayah Sungai Lintas Kabupaten/Kota</i>	112	715	0	59	67.000.000,00	-	-	-	-	-	35	200.000.000,00	-
	3.29.02.1.03	Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	<i>Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Implementasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi</i>	-			1 Laporan	67.000.000,00			-	-	-	1 Laporan	200.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, ESDM DAN TRANSMIGRASI
	3.29.02.1.03.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Implementasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi</i>				1 Laporan	67.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	1 Laporan	200.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, ESDM DAN TRANSMIGRASI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	3.29.03	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA						90.000.000,00						-	200.000.000,00	
		[Meningkatkan Tata Kelola Mineral dan Batubara]	Jumlah Rekomendasi terhadap Usulan IPR	10	0	0	10	90.000.000,00	-	-	-	-	-	10	200.000.000,00	-
	3.29.03.1.01	Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi atau Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	-			1 Laporan	90.000.000,00			-	-	-	1 Laporan	200.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, ESDM DAN TRANSMIGRASI
	3.29.03.1.01.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil														
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi atau Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil				1 Laporan	90.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	1 Laporan	200.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, ESDM DAN TRANSMIGRASI
3.	3.29.05	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN						85.280.000,00						-	180.000.000,00	
		[Meningkatkan tata kelola energi baru terbarukan]	Porsi EBT dalam Bauran Energi	19.32	12.35	13.58	15.4	85.280.000,00	-	-	-	-	-	16,38	180.000.000,00	-
	3.29.05.1.07	Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi	Jumlah laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah	-			1 Laporan	35.280.000,00			-	-	-	1 Laporan	80.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, ESDM DAN TRANSMIGRASI
	3.29.05.1.07.0002	Pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah														
			Jumlah laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah				1 Laporan	35.280.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	1 Laporan	80.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, ESDM DAN TRANSMIGRASI
	3.29.05.1.08	Pengelolaan Konservasi Energi terhadap kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi	Jumlah laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan konservasi energi pada kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi	-			1 Laporan	50.000.000,00			-	-	-	1 Laporan	100.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, ESDM DAN TRANSMIGRASI
	3.29.05.1.08.0005	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan konservasi energi pada kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi														
			Jumlah laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan konservasi energi pada kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi				1 Laporan	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	1 Laporan	100.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, ESDM DAN TRANSMIGRASI
4.	3.29.06	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN						312.387.000,00						-	936.000.000,00	
		[Meningkatkan Cakupan Pelayanan Kelistrikan]	Persentase jumlah Rumah tangga sasaran yang mendapat sambungan listrik	100	49.17	51.20	60.96	312.387.000,00	-	-	-	-	-	70,72	936.000.000,00	-
	3.29.06.1.02	Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Jumlah Prosedur dan Persyaratan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	-			2 Dokumen	23.095.000,00			-	-	-	2 Dokumen	0,00	DINAS TENAGA KERJA, ESDM DAN TRANSMIGRASI
	3.29.06.1.02.0001	Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL					DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			<i>Jumlah Prosedur dan Persyaratan lain Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi yang Ditetapkan</i>				2 Dokumen	23.095.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	2 Dokumen	0,00	DINAS TENAGA KERJA, ESDM DAN TRANSMIGRASI	
	3.29.06.1.06	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	<i>Jumlah Penerima Manfaat Dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu</i>	-			85 Keluarga	289.292.000,00			-	-	-	288 Keluarga	936.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, ESDM DAN TRANSMIGRASI	
	3.29.06.1.06.0002	Penetapan Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu															
			<i>Jumlah Penerima Manfaat Dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu</i>				85 Keluarga	289.292.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	288 Keluarga	936.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, ESDM DAN TRANSMIGRASI	
	3.32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI						200.000.000,00							270.000.000,00		
1,	3.32.03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI						100.000.000,00						-	100.000.000,00		
		[Meningkatkan kualitas pembangunan kawasan transmigrasi]	Persentase Luas Kawasan Transmigrasi yang Berkembang	100	0	0	14.85	100.000.000,00	-	-	-	-	-	35.9	100.000.000,00	-	
	3.32.03.1.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	<i>Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</i>	-			1 Laporan	100.000.000,00			-	-	-	1 Laporan	100.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, ESDM DAN TRANSMIGRASI	
	3.32.03.1.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah Kabupaten/kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi															
			<i>Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</i>				1 Laporan	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	1 Laporan	100.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, ESDM DAN TRANSMIGRASI	
2,	3.32.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI						100.000.000,00						-	170.000.000,00		
		[Meningkatkan pemberdayaan dan kapasitas transmigran dalam pengembangan kawasan transmigrasi]	Persentase Transmigran yang Dibina dan Diberdayakan	100	0	0	18.87	100.000.000,00	-	-	-	-	-	37.74	170.000.000,00	-	
	3.32.04.1.01	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan	<i>Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam Rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan</i>	-			1 Satuan Permukiman	100.000.000,00			-	-	-	1 Satuan Permukiman	170.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, ESDM DAN TRANSMIGRASI	
	3.32.04.1.01.0002	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Pemantapan Satuan Permukiman															
			<i>Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam Rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan</i>				1 Satuan Permukiman	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	1 Satuan Permukiman	170.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, ESDM DAN TRANSMIGRASI	
		UPTD BALAI LATIHAN KERJA, TRANSMIGRASI DAN PENGEMBANGAN PRODUKTIVITAS							330.000.000,00							350.000.000,00	
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						330.000.000,00							350.000.000,00		
	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA						330.000.000,00							350.000.000,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL					DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.	2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						180.000.000,00						-	200.000.000,00		
	2.07.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-			1 Laporan	180.000.000,00			-	-	-	1 Laporan	200.000.000,00	UPTD BALAI LATIHAN KERJA, TRANSMIGRASI DAN PENGEMBANGAN PRODUKTIVITAS	
	2.07.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor															
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	180.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	1 Laporan	200.000.000,00	UPTD BALAI LATIHAN KERJA, TRANSMIGRASI DAN PENGEMBANGAN PRODUKTIVITAS	
2.	2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA						150.000.000,00						-	150.000.000,00		
	2.07.03.1.01	Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n (UPTD Balai Latihan Kerja)	-			30 Orang	150.000.000,00			-	-	-	30 Orang	150.000.000,00	UPTD BALAI LATIHAN KERJA, TRANSMIGRASI DAN PENGEMBANGAN PRODUKTIVITAS	
	2.07.03.1.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi															
			Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n				30 Orang	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	30 Orang	150.000.000,00	UPTD BALAI LATIHAN KERJA, TRANSMIGRASI DAN PENGEMBANGAN PRODUKTIVITAS	
		J U M L A H							18.240.940.000,00							24.269.593.026,00	



BAB V

PENUTUP

Program Pembangunan Provinsi Gorontalo di bidang ketenagakerjaan, ESDM dan ketransmigrasian diselenggarakan sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029, Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029 serta Rencana Kerja Tahun 2026, juga diarahkan pada pembinaan, pendayagunaan, perlindungan dan pelayanan publik di ketiga bidang tersebut. Terlebih kompleksitas permasalahan di bidang ketenagakerjaan, ESDM dan ketransmigrasian membutuhkan kebijakan dan program yang mengarah pada kebutuhan dengan tingkat urgensi tinggi.

5.1. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian

Pada usulan RENJA tahun 2026 ini terdapat beberapa kegiatan yang perlu penyesuaian dengan target yang ada pada RENSTRA dinas. Beberapa kegiatan yang perlu mendapat perhatian Kembali adalah sebagai berikut:

- I. Di bidang ketenagakerjaan, diperlukan berbagai strategi dalam Upaya penyediaan lapangan kerja alternatif bagi Angkatan kerja yang belum mendapatkan pekerjaan atau masih menganggur sesuai dengan kualifikasinya. Upaya tersebut dilakukan bersamaan dengan Upaya peningkatan kualitas dan daya saing tenaga kerja serta Upaya peningkatan kesejahteraan dan perlindungan tenaga kerja dalam kerangka menjaga iklim ketenagakerjaan yang kondusif.
- II. Di bidang ESDM, diperlukan untuk terus meningkatkan pelayanan penyediaan kebutuhan Listrik bagi Rumah Tangga Tidak Mampu. Selain itu, terkait pertambangan yang masuk menjadi salah satu isu strategis Dinas, masih diperlukan kegiatan penyusunan dokumen reklamasi pasca tambang maupun dokumen lainnya yang mendukung kegiatan pertambangan di Provinsi Gorontalo.
- III. Di bidang transmigrasi, diperlukan peningkatan infrastruktur dasar di Lokasi transmigrasi meliputi jalan dan jembatan. Penguatan kapasitas warga





transmigrasi juga perlu terus untuk dilaksanakan untuk meningkatkan perekonomian warga transmigrasi.

5.2. Kaidah-kaidah pelaksanaan

Pelaksanaan program kegiatan yang ada pada dokumen Rencana Kerja tahun 2026 ini akan dilaksanakan sesuai prosedur yang telah di tentukan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Terhadap catatan penting diatas akan menjadi bahan diskusi/masukkan pada bidang mitra dalam penentuan pagu akhir program kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2026.

5.3. Rencana Tindak Lanjut

Rencana tindak lanjut terhadap catatan penting diatas adalah tetap memperhatikan dan menjadikan target akhir renstra sebagai acuan dalam pelaksanaan program kegiatan. Oleh karena itu untuk pemenuhan target RENSTRA beberapa target kegiatan tersebut diatas akan dimasukkan menjadi usulan tambahan yang kemudian akan dibahas pada tingkat selanjutnya.

Goontalo, Juni 2025
Kepala Dinas
Tenaga Kerja ESDM dan Transmigrasi
Provinsi Gorontalo

Drs. WARDOYO PONGOLIU, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19690524 198902 1 002

